



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
HUKUM ADAT TERHADAP PEMANFAATAN
TANAH ULAYAT UNTUK
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

Diajukan oleh :

C. TULUS BROTO HARGONO
No. Mhs. : 01.746/PS/MH

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER ILMU HUKUM
2003**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Teknologi 2003

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : C. Tulus Broto Hargono
Nomor Mahasiswa : 01.746/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Kawasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Tanggal,

Pembimbing I,

SW. Endah Cahyowati, SH., MS.

Tanggal,

Pembimbing II,

OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum.



Direktur Program,

Dr. J. Sukmawati, MM.



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Tengahan 2003

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT
TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

C. Tulus Broto Hargono, SH.
No. Mhs. : 01.746/PS/MH

Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji
Pada tanggal : 5 Mei 2003

Dewan Pengaji :

Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum.
Ketua

SW. Endah Cahyowati, SH., MS.
Anggota

OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum.
Anggota

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya pribadi dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah sebelumnya ada. Semua yang tertulis baik berupa data, teks, gambar, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, kecuali yang telah secara tertulis diacu dalam tesis ini adalah murni karya saya dan merupakan hasil kerja pribadi.

Yogyakarta, Mei 2003



(C. Tulun Broto Hargono)
01. 746 / PS / MH

“CORNELIUS TULIS BROTO HARGONO” mempersembahkan buat....

“Jangan dikira cinta hanya datang dari keberadaan yang lama dan karena pendekatan yang tekuu. Cinta adalah kecintaan jiwa dan jika itu tidak pernah ada, cinta tak akan pernah tercipta dalam hitungan zahun
...bahkan abad !

Cinta berlalu di depan kita, terbalut dalam kerendahan hati
tapi kita lari dariya dalam ketakutan, atau bersembunyi di dalam
kegelapan, atau yang lain malah menggarnya untuk berbuat jahat
..... atas namanya ! ”

{Atas Nama Cinta - Kahlil Gibran}



Rapak dan Ibu - ku yang teroina, . . . terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, dan kasih yang tercurah selama ini untuk aku !

*My Sisters and Brothers (†), mbak Ambar, mas Sri, mas Urip,
and mbak Brigitta, . . . terima kasih atas restu dan tuntunan yang telah kalian berikan untukku selama ini !*

My Dearest, Christina Anna Girisanti, . . . terima kasih atas kesabaran, dorongan, dan segala pengorbanan yang tulis kamu berikan untukku !

*To You All, My Friends and My "Little sisters - brothers", . . .
atas inspirasi, semangat, dan persahabatannya . . . kan kuckenang selaku . . . terima kasih untuk semuanya !*



“

“JADILAH ALAT-MU BAGI SESAMAMU . . . ! ”

“

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih-Nya, sehingga terselesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Kawasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Asing”. Adapun pembuatan tesis ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tesis ini berkat arahan, bimbingan, bantuan dan dorongan, baik materiil maupun spirituil, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Y. Sukmawati, MM., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode II tahun 2000 s/d April 2003.
3. Ibu Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode III tahun April 2003 s/d sekarang.

4. Ibu SW. Endah Cahyowati, SH., MS, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk penyusunan tesis ini.
5. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum . Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan dorongan, mendidik dan membantu penulis untuk membuka wawasan selama masa studi.
7. Seluruh karyawan Admisi Program Pascasarjana, Unit Perpustakaan, Bagian Pengajaran Fakultas Hukum, serta Satpam dan Cleaning Service Kampus Mrican Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.
8. Rina “Rintul”, Pie-Pien “Ponorogo”, Haposan “Ucox”, Windu “Brotherhood”, Arie “Kenthang”, Dana “Tah ilik”, dan seluruh rekan-rekan Angkatan III tahun 2001 (full time dan part time) serta Angkatan II (part time) Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas kebersamaannya dalam melewati *“masa-masa indah”*.
9. Rekan-rekan Angkatan '94 (Devi, Yoseph, Gothank, Boedi, Alex, Gunarso, Wawan, Sinden, Trucuk, dll.) dan “Komunitas Anak Ayam”, serta Andi “nDom-nDom”, Danang “Hitam”, Nanang “Suwung” di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas kebersamaannya dalam suka dan duka, *“Sukses juga buat kalian, boy! ”*.

10. Tietiek, SKG. dan Leony, SKG. (bersama *mas-masnya*) di Sekip A-7, serta rekan-rekan di Sambu 2, atas dukungan spirituial dan sindirannya, “*Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu* ”.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, “*Pasti akan ada saatnya* ”.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum .

Yogyakarta, Mei 2003

Penulis,

C. Tulus Broto Hargono

01.746 / PS / MH

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dan Tanah Hak Ulayat	11
a. Pengertian Perlindungan Hukum	11
b. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	12

c. Pengertian Tanah Hak Ulayat Suatu Masyarakat	
Hukum Adat	15
2. Kawasan Industri dan Penanaman Modal Asing	17
a. Pengertian Kawasan Industri	17
b. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA).....	19
3. Pemanfaatan Tanah Oleh Badan Hukum Yang Sebagian Atau Seluruhnya Bermodal Asing Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	22
BAB III. CARA PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	26
2. Bahan Penelitian Hukum	26
3. Analisis Bahan Hukum	28
4. Sistematika Penulisan	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Menurut Hukum Adat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dan PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999	31
B. Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat Bagi Pembangunan Kawasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA)	54
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

INTISARI

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Kawasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Asing ini dilatarbelakangi dengan adanya sengketa-sengketa mengenai pemanfaatan tanah ulayat yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat untuk pembangunan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing. Masyarakat hukum adat lebih sering dirugikan dan terabaikan hak-haknya dalam pemanfaatan tanah ulayatnya bagi pembangunan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya dimanfaatkan bagi pembangunan kawasan industri oleh badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing dalam rangka penanaman modal asing. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sejak tanggal 24 September 1960 patut ditinjau kembali, terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat serta pemanfaatan tanah ulayatnya, agar dapat mendukung minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, makalah-makalah dalam seminar, buku-buku yang mendukung, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat terhadap pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran tentang upaya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya dimanfaatkan, kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat telah dilakukan dengan diterbitkannya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999, namun tanpa didukung peraturan perundang-undangan yang jelas maka usaha tersebut akan banyak menemui hambatan di dalam pelaksanaannya. Terutama pelaksanaan dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1992 yang kurang jelas dan tegas mengenai penggunaan status tanahnya.

Kata kunci : Masyarakat hukum adat, hak ulayat, kawasan industri, penanaman modal asing.

ABSTRACT

The background of research about the Law Protection for Traditional Law Society Toward Ulayat Land Usage for Industrial Area Development in the Framework of Foreign Capital Investment is the presence of conflicts of ulayat land usage dominated by a traditional law society for industrial area development in the framework of foreign capital investment. Traditional law society was more often suffered a loss and their right was disregarded in ulayat land usage for development.

This research was conducted to understand the efforts of law protection for traditional law society whose ulayat land was used for industrial area development by law institution in part or entirely have foreign capital in the framework of foreign capital investment. The prevalence of UU No. 5 Tahun 1960 in effect since September 24 1960, ought to be reviewed again; especially in the efforts of giving law protection for the existence of traditional law society and the use of their ulayat land, as to be able to support foreign investors' interest to invest their capital in Indonesia.

Type of research used is normative law research, which being conducted by analyzing ordinances regulation, papers in seminar, supporting books, and research results that related to law protection for traditional law society toward ulayat land usage for industrial area development in the framework of foreign capital investment. Those law materials were analyzed qualitatively, so that figure about law protection efforts was obtained for traditional law society whose ulayat land used. Then, it can be drawn conclusions by using inductive-thinking method.

The attempts to complete problems of ulayat rights of traditional law society has been carried out by the publication of PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999, but with no obvious ordinances regulation supported behind it. So, those attempts will find many obstacles in its implementation. In particular, the implementation in ulayat land usage for industrial area development in the framework of foreign capital investment as was being regulated within Keppres No. 32 Tahun 1992 that less obvious and less explicit about their land status usage.

Keywords : traditional law society, ulayat rights, industrial area, and foreign capital investment.